

ALASAN INGGRIS KELUAR DARI KEANGGOTAAN UNI EROPA TAHUN 2016

Dhia Khairunnisa

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Politik,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

As the member of European Union, United Kingdom relations with European Union is not always good. United Kingdom has their national interest for their guidelines in every decision making proses. Although, United Kingdom got many advantage from economic sides. In the other side, the more integrated European Union, the more power they have to make a regulation over their member. It makes European Union member lose their sovereignty of their country to regulate and manage their own country because European Union take much regulations over their member. The 2016 Referendum yesterday, is the result of 43 years of United Kingdom's memberships in European Union. The referendum was held due to the demand of United Kingdom Independence Party and Conservative Prime Minister, David Cameroon's promise on his campaign. Vote Leave Group Campaign take a part in the referendum campaign with their main tagline about "take back control" of United Kingdom own sovereignty. The referendum also affected by British and European Union unstable relations over last decades.

Keyword: Referendum, Inggris, Uni Eropa, UKIP, Vote Leave.

PENDAHULUAN

Negara Inggris mempunyai nama resmi United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. United Kingdom adalah sebuah negara kesatuan yang terdiri dari empat negara yang masing-masing berdiri sendiri yaitu England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya European Coal and Steel Community dengan traktat yang ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luxemburg, dan Prancis pada tanggal 18 April 1951. Kerjasama ekonomi ini awalnya hanya beranggotakan 6 negara.

Kemudian para menteri luar negeri keenam negara memutuskan untuk memperluas kerjasama tidak hanya pada biji besi dan baja tetapi keseluruhan bagian ekonomi dengan membentuk kerjasama lain yaitu European Atomic Energy Community (Euratom) dan European Economic Community yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Pada tanggal 8 April 1965, European Coal and Steel Community , European Atomic Energy Community, European Economic Community digabung menjadi satu yaitu European Community. Seiring berjalannya waktu European Community semakin mengalami kemajuan dalam intergrasi dan kebijakan sehingga pada tanggal 1 November 1993 dengan Perjanjian Maastricht (Treaty on European Union) European Community dirubah menjadi Uni Eropa.¹

Dengan didirikannya ECSC, Industri Inggris sangat dirugikan karena tidak dapat bersaing dengan Jerman, Perancis, dan Italia yang dapat dengan bebas bergerak diantara negara anggota ECSC. Tahun 1961 Inggris menyampaikan permintaan untuk bergabung ke European Community. Namun keinginan itu mendapat penolakan dari sejumlah negara Eropa, khususnya Prancis. Permintaan Inggris ditolak dua kali oleh Charles de Gaulle yang menjabat sebagai presiden pada saat itu. Setelah de Gaulle lengser dan digantikan Felix Gouin, tepatnya pada 1967, Inggris kembali melamar menjadi anggota European Community. Langkah Inggris memuahkan hasil pada 1 Januari 1973 permohonan itu diterima dan Inggris resmi bergabung dengan European Community.²

Setelah bergabungnya Inggris ke European Community, 2 tahun setelahnya yaitu pada 5 Juni 1975 Inggris mengadakan referendum apakah mereka akan tetap bergabung atau keluar dari keanggotaan European Community. Referendum pertama menghasilkan 67% suara untuk

¹ Edison Muclis, *Integrasi menuju Uni Eropa*, CSIS. Jakarta. 1997. hal 550-555

² Hansard. "European Community Parliamentary Debates". *House of Commons*. 1975 hal. 1465-1480.

tetap di Uni Eropa. Hubungan Inggris dan Uni Eropa mengalami ketegangan selama 10 tahun belakangan ini. Sehingga membangkitkan desakan dari dalam masyarakat Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Munculnya partai United Kingdom Independence Party dan Vote Leave sebagai pendorong tuntutan untuk mengadakan referendum agar Inggris keluar berhasil menggiring referendum dengan hasil keputusan mayoritas warga Inggris yang memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Pada tahun 1975 Inggris mengadakan referendum pertama yang menghasilkan keputusan untuk melanjutkan keanggotaannya. Disusul dengan referendum kedua yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016 yang berujung dengan 51,9% suara rakyat Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa³.

PEMBAHASAN

Dalam proses awal pembentukan Uni Eropa, sebenarnya Inggris memiliki beberapa peluang untuk berpartisipasi, akan tetapi Inggris memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam berdirinya Uni Eropa (pada saat itu masih berbentuk European Community). Pada tanggal 18 April 1951 melalui *The Treaty of Paris, The Schuman Plan* diterima oleh Prancis, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, dan Luxemburg. *European Coal and Steel Community* resmi berdiri pada tanggal 10 Agustus 1952 dengan deklarasi yang ditandatangani oleh 6 negara tersebut. Tujuan Utama ECSC adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan pasar bersama.⁴

Pada awalnya Inggris menolak tawaran untuk membentuk European Coal and Steel Community. Inggris lebih memprioritaskan hubungan bilateral dengan mantan koloninya yaitu

³ Beddoes,Z.M, "The Brexit Brief: our guide to Britain's EU Referendum,"The Economist(Juni,2016),hal.5

⁴ *Ibid.*

Amerika Serikat dan Uni Soviet⁵. Pada saat itu, Inggris menganggap ECSC tidak begitu menguntungkan bagi Inggris yang sudah mempunyai ekonomi yang stabil dibanding negara anggota ECSC. Terlebih karena tujuan didirikannya untuk membuat kerjasama antar negara terkait konflik akibat perang dunia kedua guna mencegah konflik berkelanjutan antara Prancis dan Jerman. Inggris tidak merasa diuntungkan dalam tujuan tersebut.

Akan tetapi pandangan politik luar negeri Inggris mulai berubah ketika Inggris berada pada masa jabatan Perdana Menteri Harold Macmillan (1957 – 1963) setelah melihat adanya keberhasilan ECSC. Pada tahun 1973 Inggris sedang terkena dampak krisis minyak yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi di Inggris. Sedangkan disekitarnya, keberhasilan ECSC terdengar sampai ke parlemen Inggris. Beberapa keberhasilan ECSC yang menonjol adalah ECSC mampu menangani krisis minyak yang terjadi pada saat itu dengan produksi baja meningkat empat kali lipat di negara anggota ECSC. Jika dibandingkan dengan tahun 1950-an, ECSC juga meningkatkan kesejahteraan pekerja tambang.⁶

Seiring berjalannya waktu, Inggris mulai melihat Perancis dan Jerman berhasil membangun pemulihan ekonomi negaranya pasca perang dan membentuk aliansi yang kuat dengan negara anggota yang lain. Ditambah dengan berkembangnya European Coal and Steel Community menjadi European Community, Inggris merasa semakin perlu berada dalam meja kepemimpinan Eropa demi menancapkan pengaruhnya terhadap negara di Eropa. Awal ketertarikan Inggris untuk bergabung adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kerjasama ekonomi Eropa tersebut. Akan lebih menguntungkan bagi Inggris untuk masuk dan menjalin hubungan ekonomi yang lebih leluasa apabila berada dalam satu hubungan kerjasama ekonomi dengan beberapa

⁵ Boyle C, *Loc.Cit*

⁶ “*Treaty establishing the European Coal and Steel Community, ECSC Treaty*”. (London: EUR-Lex. 2010). diakses pada 1 Maret 2017

negara anggota ECSC. Daripada Inggris membangun hubungan bilateral dengan setiap negara diluar suatu komunitas. Inggris kemudian menyadari PNB perkapita negara-negara yang tergabung dalam European Community dengan PNB Inggris mempunyai perbedaan yang cukup jauh. Kondisi tersebut yang kemudian melatarbelakangi keinginan Inggris untuk bergabung dengan European Community

Inggris menyampaikan permintaan untuk bergabung ke European Community pertama kali pada tahun 1961. Namun permintaan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah negara Eropa khususnya Prancis. Kemudian tahun 1963 Inggris kembali melamar dan ditolak kembali oleh Charles de Gaule yang menjabat sebagai presiden Prancis pada saat itu. Alasan Charles de Gaule menolak Inggris dua kali adalah ketakutan Prancis apabila Inggris akan menjadi musuh dalam selimut bagi Eropa karna kedekatan Inggris dengan Amerika Serikat. Setelah Charles de Gaule lengser, Inggris mengajukan permohonan kembali pada tahun 1967 pada masa kepemimpinan Edward Heath dari Partai Konservatif. Akhirnya perjuangan Inggris membuahkan hasil pada saat itu, permohonan Inggris diterima dan Inggris resmi bergabung dengan European Community pada 1 Januari 1973 bersama dengan Denmark dan Irlandia.

Dalam rentang waktu 2 tahun setelah bergabung pada 5 Juni 1975 Perdana Menteri Harold Wilson mengadakan referendum tentang keanggotaan Inggris di European Community. Referendum tersebut berbunyi “Apakah Inggris akan tetap bergabung dengan European Community atau keluar“. Hasilnya, mayoritas dari daerah administratif di Inggris menjawab “Ya“ untuk tetap tinggal di European Community dengan presentase 67,2%. Sedangkan 32,8%

menjawab “tidak“ untuk keluar dari European Community.⁷ Keanggotaan Inggris di Uni Eropa pun tetap dilanjutkan.

Menurut Pemikiran William D Coplin, dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri suatu negara akan mempertimbangkan pada 3 konsideran. Yaitu tuntutan politik dari dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer negara tersebut, dan lingkungan internasionalnya. Sebelum parlemen memutuskan untuk mengadakan refeendum, gagasan referendum didorong oleh tuntutan dari partai *United Kingdom Independence Party*. Partai tersebut berperan sebagai *partisan influencer* dalam politik dalam negeri Inggris. Partai tersebut berkembang dengan isu menentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa. UKIP mempengaruhi masyarakat dengan isu Brexit dan membawa isu tersebut ke parlemen. Sehingga partai ini dapat meraih 12,6% suara pada UK General Election tahun 2015 dengan peringkat ketiga. Setelah parlemen Inggris memutuskan untuk mengadakan referendum, kampanye Brexit datang dari organisasi kampanye “*Vote Leave*” yang merupakan organisasi kampanye resmi yang dibentuk pemerintah. *Vote Leave* membawa isu kedaulatan dan imigrasi yang selama ini menjadi pengganjal hubungan Inggris dengan Uni Eropa sehingga berhasil membawa rakyat Inggris dengan 51,9% suara rakyat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa.

Selain tuntutan dari dalam negeri, keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa juga merupakan hasil dari hubungan Inggris dengan Uni Eropa yang sedang tidak harmonis sepuluh tahun belakangan. Beberapa kebijakan Uni Eropa seperti Kebijakan Mata Uang Tunggal dan Schengen Area tidak disetujui Inggris lalu memilih untuk “*option out*“ dari kebijakan tersebut.

⁷ Prasetyo, Z., *Loc.Cit*

Selain dua kebijakan tersebut, kebijakan Common Foreign and Security Policy juga dianggap merugikan Inggris karena membatasi hubungan luar negeri Inggris dengan negara lain. Perdana Menteri David Cameron telah berusaha untuk menegosiasikan posisi keberatan Inggris terhadap kebijakan tersebut akan tetapi gagal. Sehingga jika dilihat dari kemampuan ekonomi dan militer Inggris, rakyat Inggris merasa mampu untuk memilih keputusan keluar dari Uni Eropa. Apa yang didapatkan Inggris dari Uni Eropa dianggap tidak sepadan dengan apa yang telah diberikan Inggris kepada Uni Eropa. Keputusan keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada referendum 2016 kemarin dianggap merupakan solusi untuk mempertahankan kedaulatan Inggris sebagai suatu negara yang merdeka dengan menjalankan fungsi institusi negaranya sendiri.

A. Referendum Inggris tahun 2016

Referendum Brexit kedua dilaksanakan pada 23 Juni 2016. Dengan pertanyaan “Apakah Inggris harus melanjutkan keanggotaannya di Uni Eropa atau tidak“. Referendum diikuti oleh 71,8 % pemilih yang terdiri dari warga negara Inggris yang berumur 18 tahun keatas termasuk orang yang berkewarganegaraan Inggris yang terdapat di Ireland dan Commonwealth, yang terdiri dari 53 negara termasuk Australia, Canada, India, dan Afrika Selatan⁸. Anggota dari *House of Lords* juga ikut memilih.

Referendum sendiri merupakan proses jajak pendapat (pemungutan suara) yang dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan terutama keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara secara keseluruhan. Sehingga hasil dari referendum tersebut menjadi suatu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya oleh suatu negara.

⁸ Official Result from Electoral Commission of EU Referendum in Manchester, [”http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/journalist/electoral-commission-media-centre/news-releases-referendums/official-result-of-the-eu-referendum-is-declared-by-electoral-commission-in-manchester](http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/journalist/electoral-commission-media-centre/news-releases-referendums/official-result-of-the-eu-referendum-is-declared-by-electoral-commission-in-manchester)

Menurut data dari *Electoral Commission of EU Referendum*, sebanyak 48,1% (16,141,241) suara menjawab “tetap di Uni Eropa” untuk tetap menginginkan Inggris di Uni Eropa sedangkan 51,9% (17,410,742) menjawab “keluar dari Uni Eropa” untuk mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa.⁹ Hasil referendum adalah Inggris akan keluar dari Uni Eropa. Hasil voting referendum bervariasi di setiap wilayah United Kingdom. Pada wilayah pusat kota besar seperti London, Scotland, dan Northern Ireland dimenangkan oleh *Remain*. Sisanya dimenangkan oleh kubu *Leave*. Dapat dilihat jika masyarakat di kota-kota besar cenderung menyetujui adanya integrasi dan keuntungan ekonomi dari Uni Eropa. Sedangkan masyarakat di kota-kota kecil cenderung kontra terhadap Uni Eropa

B. Pengaruh United Kingdom Independence Party (UKIP) dalam menuntut keluarnya Inggris dari Uni Eropa

Referendum pertama kali dikampanyekan oleh partai anti Uni Eropa yaitu United Kingdom Independence Party sejak kemunculan pertama partai tersebut. Setelah Partai Konservatif memenangkan suara mayoritas pada *General Election* Mei 2015, Perdana Menteri David Cameron telah melakukan beberapa negosiasi dengan Uni Eropa sebelum akhirnya memutuskan untuk mengadakan referendum sebelum akhir 2017 dengan desakan yang mayoritas terus datang dari politisi Partai UKIP (United Kingdom Independence Party).

United Kingdom Independence Party adalah partai yang muncul dengan isu menentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Partai ini pertama kali muncul pada tahun 1993 saat Inggris masih dipimpin Perdana Menteri Theresa May. UKIP memiliki pandangan Anti-Uni Eropa, sejak awal dibentuk oleh Profesor Alan Sked dari London School of Economics yang berkampanye menentang Maastricht Treaty tahun 1991. Sked mendirikan UKIP pada tahun

⁹ *Ibid.*,

1993, setelah Inggris meratifikasi Maastricht Treaty, perjanjian yang merupakan pendirian Uni Eropa¹⁰. Partai ini menuntut Inggris untuk tidak menyetujui pemusatan kekuatan “ Uni Eropa” yang satu sesuai dengan isi perjanjian Maastricht. Saat kemunculannya, UKIP mengungkap program anti Imigran dan anti Uni Eropa sebagai wujud protes atas keanggotaan Inggris di Uni Eropa.¹¹

Di parlemen Inggris sendiri, partai ini megawali dengan 1,5 % suara pada pemilu tahun 2001 partai ini hanya memperoleh 1 kursi di parlemen. pada pemilu tahun 2005 partai ini berhasil meningkatkan suara dengan memperoleh 2,3 % suara mengamankan 38 kursi. Di pemilu selanjutnya, sebanyak 3,2% diraih partai ini dengan meningkatkan jumlah kursi menjadi 100 kursi di parlemen. UKIP memperoleh terobosan suara pada pemilu tahun 2015 kemarin, partai tersebut memperoleh 12,6% suara. Hasil tersebut meningkat 20% dari pemilu terakhir ditahun 2010 yang mendapat 3,2% suara.¹²Pada pemilu tahun 2010 UKIP mendapat posisi ke empat. Sedangkan pada pemilu 2015 Partai UKIP berhasil meraih urutan ketiga setelah partai Konservatif dan Partai Buruh dengan kampanye anti-EU, anti-immigration, pro-coal platform.¹³

Dalam website resminya, UKIP mengemukakan beberapa hal yang dijanjikan apabila partai tersebut menang pemilu 2015. Dari beberapa aspek bidang yang dikampanyekan, kampanye utama UKIP adalah agar Inggris keluar dari Uni Eropa dan mengakhiri politik "pintu terbuka" terhadap para imigran, terutama yang berasal dari negara-negara Uni Eropa.¹⁴ Isu imigrasi

¹⁰ Hunt,Alex, "UKIP : The story of the UK Independence Party's rise", BBC News, diakses dari <http://www.bbc.com/news/uk-politics-21614073> pada tanggal 15 Februari 2017

¹¹ Ray,Michael, "Encyclopedia Britannica", diakses dari <http://www.britannica.com/topic/United-kingdom-Independence-Party> pada tanggal 15 Februari 2017

¹² Hunt Alex, *Loc.Cit.*

¹³ Samuel Robert, "UK Election 2015", BBC News, diakses dari <http://www.bbc.com/news/politics/constituencies/E14000668> pada tanggal 15 Februari 2017

¹⁴ UK Independence Party Official Site, "www.ukip.org" (akses 15 Februari 2017)

memang merupakan salah satu isu penting bagi pemilih dan UKIP menggunakan isu tersebut untuk menarik simpati masyarakat Inggris agar mendukungnya.

C. Pengaruh Organisasi Kampanye “Vote Leave” dalam referendum

Sebelum referendum, terdapat dua organisasi kampanye resmi yang dibentuk pemerintah Inggris yaitu “*Britain Stronger in Europe*” dan “*Vote Leave*“. *Britain Stronger in Europe* adalah organisasi kampanye resmi yang menyuarakan Inggris untuk tetap tinggal di Uni Eropa. Organisasi kampanye ini terdiri dari sejumlah besar CEO perusahaan. Sedangkan *Vote Leave* adalah organisasi kampanye resmi yang menyuarakan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Pada kubu *Remain* (*Britain Stronger in Europe*) isu yang diangkat adalah isu ekonomi yaitu Uni Eropa sebagai mitra ekspor impor ekonomi bagi Inggris dan besarnya kerugian ekonomi yang akan didapatkan Inggris apabila keluar dari Uni Eropa. Sedangkan untuk kubu “Leave”, isu yang diangkat adalah isu imigrasi, dan isu kedaulatan Inggris.¹⁵

Isu kampanye utama yang diangkat oleh Vote Leave adalah isu tentang imigrasi dan EU budget. Dalam analisis yang diadakan oleh Vote Leave, menemukan bahwa Biaya keanggotaan Uni Eropa dan tanggungan regulasi dari Uni Eropa lebih berat dari pada manfaat yang didapatkan oleh Inggris dari Uni Eropa. Kontribusi Inggris untuk Uni Eropa dan regulasi Single Market sebesar 41 billion Euro tahun 2015. Komisi Eropa sendiri menunjukkan manfaat dari Single Marker setara dengan 37 billion Euro saja.¹⁶

¹⁵ Sara B.Hobolt, “The Brexit Vote : a divided nation a divided continent,” *Journal of European public policy*, (2016), hal.4.

¹⁶ Steven Swinford, “Costs of EU membership outweigh benefits”, *The Telegraph*, diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/newstoppers/eureferendum/12072128/Costs-of-EU-membership-outweigh-benefits.html> pada tanggal 20 Februari 2017

Pesan kunci bagi Vote Leave adalah “*take back control*” terutama mengenai kebijakan imigran. Maksud dari pesan “take back control” adalah tujuan dari lepasnya Inggris dari Uni Eropa sehingga Inggris dapat kembali mengatur dan menguasai negaranya sendiri.¹⁷ Selama Inggris masih terikat menjadi anggota Uni Eropa, Inggris tidak akan bisa mengatur wilayah negaranya sendiri dan kehilangan kedaulatan. Oleh karena itu, Vote Leave mengajak masyarakat Inggris untuk merebut kembali kekuatan untuk mengatur negaranya sendiri dengan keluar dari kekangan Uni Eropa

D. Beberapa Kebijakan Uni Eropa yang Merugikan Inggris

Hubungan Inggris dengan Uni Eropa tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat dinamika hubungan yang terjadi antara Inggris dengan Uni Eropa. Beberapa tindakan atau kebijakan Uni Eropa terkadang tidak sejalan dengan kepentingan nasional Inggris. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah ;

1. European Monetary Union

European Monetary Union adalah kebijakan ekonomi bersama dan aturan bagi negara anggota untuk menggunakan mata uang tunggal (Euro) yang dipakai oleh seluruh negara anggota. European Monetary Union merupakan bagian dari European Economic and Monetary Union yang diuncurkan pada tahun 1992. Kebijakan ini pada awalnya merupakan kebijakan ekonomi dan fiskal, kebijakan moneter secara umum yang mengikat semua anggota Uni Eropa. Diawali dengan keputusan untuk membentuk Economic and Monetary Union oleh Dewan Eropa pada perjanjian Maastricht.

Penggunaan Euro sebagai mata uang tunggal di Eropa dianggap sebagai hasil kesuksesan European Economic and Monetary Union. Beberapa negara telah menempuh

¹⁷ Vote Leave Official Website, *Loc. Cit.*

integrasi lebih lanjut dengan mengadopsi Euro sebagai mata uang negara tersebut kecuali Inggris dan Denmark. Inggris telah memilih keluar dari pengadopsian Euro sejak awal dengan memilih “option out”. Ketika euro pertama kali dinobatkan sebagai mata uang tunggal untuk Uni Eropa, Perdana Menteri Inggris saat itu, Tony Blair mengatakan bahwa harus ada “5 tahapan tes” yang harus dilalui negaranya hingga negaranya mau mengadopsi euro¹⁸.

Pemerintah Inggris tidak ingin melepaskan kontrol kebijakan suku bunga negaranya ke Uni Eropa yang akan terjadi ketika suatu negara mengadopsi sistem Euro. Banyak yang berpendapat apabila Inggris bergabung dengan Euro, Inggris akan mendapatkan pengaruh ekonomi yang lebih mendalam diantara negara yang mengadopsi Euro. Akan tetapi Inggris akan menyerahkan terlalu banyak kedaulatan negaranya untuk mengatur mata uang negaranya. Harga yang dibayarkan Inggris dengan menyerahkan kekuasaan negaranya untuk mengatur sendiri mata uangnya tidak sepadan dengan keuntungan ekonomi yang didapatkan Inggris apabila mengadopsi Euro. Jika Inggris bergabung untuk mengadopsi Euro, maka Inggris akan kehilangan pengaruhnya mengurus urusan dalam negeri negaranya yang merupakan hal terpenting sebagai tolok ukur kedaulatan suatu negara¹⁹.

2. Common Foreign and Security Policy

Common Foreign and Security Policy adalah kesepakatan kebijakan luar negeri anggota Uni Eropa yang mencakup isu keamanan dan aksi pertahanan berbentuk diplomasi atau tindakan. Berdasarkan pada Perjanjian Maastricht bab V pasal J.1 kesepakatan dalam kebijakan ini mengacu pada bagian tertentu dari hubungan luar negeri Uni Eropa. Kebijakan

¹⁸ Gerty Firlmnl, “Why doesn’t England use euro?,” <http://www.investopedia.com/ask/answers/100314/why-doesnt-england-use-euro.asp> (akses pada 15 Maret 2017)

¹⁹ John Coles, “Euroseptical Reader : British influence and the Euro,” *Palgrave Macmillan Journal*, no 2 (Juni, 2001), hal 8-9.

ini implementasi dari kebijakan luar negeri dan keamanan umum Uni Eropa yang mencakup semua bidang kebijakan hubungan luar negeri dan keamanan. Termasuk pada bidang perdagangan antar negara, kebijakan komersial, pendanaan untuk negara ketiga, dll. CFSP memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan luar negeri negara negara anggota.

Badan yang berwenang dalam memimpin proses kebijakan ini adalah *High Representative for the Union for Foreign Affairs and Security Policy* yang dibentuk saat perjanjian Lisbon dibuat pada bulan desember 2009. *High Representative* mewakili Dewan Eropa menjadi badan yang berkuasa dalam mengartikulasikan kebijakan luar negeri yang telah disepakati. Proses pengambilan keputusan *Common Foreign and Security Policy* membutuhkan suara bulat 28 negara anggota Uni Eropa. Setelah disetujui, aspek aspek tertentu dapat ditentukan lebih lanjut oleh suara mayoritas yang memenuhi syarat.

Seiring berjalannya waktu, implementasi kebijakan ini tidak se-sederhana itu. *High Representative* semakin mempunyai kekuatan untuk memutuskan, menentukan, dan melaksanakan kebijakan luar negeri dan keamanan umum yang mencakup kepentingan nasional semua anggota. Inggris menganggap kebijakan ini semakin mencampuri urusan luar negeri suatu negara, yang tidak memerlukan campur tangan negara anggota lain dalam memutuskan hal tersebut. Masing- masing negara mempertahankan kedaulatan dan kebijakan luar negeri mereka. Begitu pula Inggris, yang tidak ingin kehilangan kekuatan (kedaulatan) mereka atas kebijakan luar negeri mereka seutuhnya. Inggris tidak ingin kebijakannya terhambat oleh prosedur yang kompleks dan dirasa tidak diperlukan.

3. Open Border Policy

Selain kebijakan mata uang tunggal, Inggris juga tidak sejalan dengan kebijakan open border policy yang dibuat oleh Uni Eropa. Di Uni Eropa, kebijakan ini dikenal dengan

Schengen Agreement yang dibuat pada tahun 1985. Ditandatangani pada tanggal 14 Juni tahun 1985, dekat kota Schengen, Luksemburg, dengan lima dari sepuluh negara anggota Uni Eropa (Belgia, Prancis, Jerman, Luksemburg, dan Belanda). Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menghapus secara bertahap pemeriksaan internal di perbatasan. Schengen Area mewakili wilayah teritorial yang menjamin pergerakan bebas orang-orang yang termasuk dalam wilayah negara anggota perjanjian tersebut. Negara yang menandatangani perjanjian tersebut menghapuskan semua batas-batas internal sebagai pengganti dari kebebasan eksternal tunggal. Kebebasan tersebut berkaitan dengan visa, permintaan suaka, kontrol perbatasan dan juga kontrol keamanan wilayah Schengen Area.²⁰

Lain dengan beberapa negara di Uni Eropa yang pada akhirnya bergabung dengan Schuman Area, hanya Inggris dan Irlandia yang masih menyatakan ketidaksetujuan mereka. Inggris dan Irlandia lebih memilih untuk mengadakan perjanjian area Common Travel Area diantara keduanya. Hal ini dikarenakan Irlandia dan Irlandia Utara berbagi satu daratan wilayah²¹. Menurut data dari Fullfact.org tahun 2015 sekitar 3,2 miliar orang yang tinggal di Inggris adalah imigran Eropa. Sekitar 5% dari populasi Inggris. Dari angka 3,2 miliar orang tersebut, sekitar 2,3 miliar imigran yang bekerja atau untuk tujuan bekerja. Inggris menjadi penerima imigran terbesar kedua setelah Jerman yang mempunyai 9,3% imigran dari total seluruh imigran Eropa. Sebanyak 5,23 juta imigran diprediksi membanjiri Inggris sampai tahun 2030.²²

²⁰ EU Law and Publication, (Agustus, 2015), diakses dari <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3A133020> pada tanggal 16 Maret 2017

²¹ Steve Peers, "The UK and The Schengen System," KING's College London Analysis, 3 Desember, 2015, hal 2.

²² EU Immigration to the UK, Fullfact.org, diakses dari <https://fullfact.org/immigration/eu-migration-and-uk/> pada tanggal 1 April 2017

Kebijakan Open Border Policy Uni Eropa yang mengharuskan para anggotanya berbagi beban mengatasi pengungsi yang mengalir ke daratan Eropa sebagai akibat dari krisis Suriah. Secara otomatis memaksa Inggris untuk membuka pintu guna menampung pengungsi tersebut. Hal utama yang diterapkan dari Perjanjian Schengen adalah menghapuskan pemeriksaan perbatasan diantara negara negara yang berpartisipasi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah dan mempercepat pergerakan orang dan jasa. Inggris dapat memilih untuk tidak bergabung dengan sistem Schengen dan memilih status “opt-out” dengan merujuk pada aturan protocol di perjanjian Amsterdam.²³ Konsekuensi dari pilihan *option-out* Inggris dari Schengen Area, Inggris masih bisa menentukan orang orang yang berhak masuk Inggris atau tidak dengan memeriksa orang orang yang datang dari seluruh Uni Eropa. Inggris tetap mengakui dan melindungi warga anggota Uni Eropa lain dan anggota keluarga mereka sesuai dengan aturan Uni Eropa terkait dengan kebebasan pergerakan orang. Namun, masuk keluarnya warga lain ke atau keluar dari Inggris dikendalikan oleh hukum Inggris.²⁴ Yang berarti, Inggris masih memiliki kekuatan ekstra untuk menguasai dan mengontrol perbatasan negaranya sendiri

PENUTUP

Latar belakang Inggris bergabung dengan Uni Eropa adalah karena kepentingan ekonomi. Mengingat Inggris bukan merupakan salah satu negara pendiri Uni Eropa walaupun sebenarnya Inggris telah diundang untuk ikut mendirikan. Inggris baru bergabung dengan Uni Eropa ketika European Community mulai menunjukkan keberhasilan ekonomi. Polemik keinginan Inggris

²³ Steve Peers,*Loc. Cit.*

²⁴ Steve Peers,*Loc. Cit.*

untuk keluar dari Uni Eropa sebenarnya telah terjadi sejak dua tahun keanggotaannya di Uni Eropa. Referendum *Brexit* pertama diadakan pada tahun 1975 dengan presentase suara 67,2% rakyat Inggris memilih untuk tetap melanjutkan keanggotaannya di Uni Eropa. Akan tetapi hasil tersebut berbeda dengan referendum kedua yang dilaksanakan pada bulan Juni 2016 lalu dengan 51,9% suara untuk meninggalkan Uni Eropa.

Keputusan tersebut merupakan hasil dari 43 tahun keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Meskipun Inggris juga turut berperan aktif dalam berbagai kebijakan Uni Eropa terutama kebijakan ekonomi, akan tetapi sejak awal Inggris tidak setuju dengan integrasi yang terlalu dalam di bidang sosial atau politik. Sehingga meskipun tergabung dalam Uni Eropa, masing masing negara masih dapat menjalankan urusan dalam negeri masing masing negara. Sebagai anggota dari Uni Eropa, Inggris mendapatkan banyak keuntungan dari segi ekonomi. Terutama dampak dari tergabungnya Inggris dalam Single Market, ekspor import Inggris ke negara Uni Eropa memberi keuntungan sekitar 4-5% dari GDP Inggris pertahun. Inggris menjadi negara yang menguasai ekspor impor di Uni Eropa

Sebagai suatu negara yang berdaulat, Inggris mempunyai kepentingan nasional negaranya yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan pengambilan keputusan luar negerinya. Terkait dengan hubungan Inggris sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, hubungan keduanya tidak selalu berjalan dengan baik. Meskipun begitu, Inggris termasuk negara yang berperan aktif membangun Uni Eropa bersama sama dengan negara anggota lain. Walaupun Inggris banyak diuntungkan dari segi ekonomi, tercatat beberapa kali Inggris menyatakan keberatan terhadap kebijakan Uni Eropa karena dianggap terlalu memberikan kekuasaan bagi Uni Eropa dan juga merugikan Inggris. Inggris dipahami sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan

nasionalnya. Semakin terintegrasinya Uni Eropa, segala hal terkait dengan ekonomi, politik, dan sosial negara anggotanya diatur oleh lembaga institusional Uni Eropa. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bagi Inggris untuk kehilangan kedaulatan negaranya untuk mengatur negaranya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Edison, M. (1997). *Integrasi menuju Uni Eropa*. Jakarta: CSIS.
- Beddoes, Z. M. (2016). *the Brexit Brief; our guide to Britain's EU referendum*. London: The Economist
- Boyle, C. (2016). Just what is the UK problem with Europe? *CNBC*.
- Coles, J. (2010). British influence and the Euro. *Palgrave Macmillan Journal*, tahun ke 14.8-9.
- Hansard. (1975). European Community Parliamentary Debates. *house of commons*, 1465-1480.
- Hobolt, S. B. (2016). Journal of European Public Policy. *The Brexit vote: a divided nation, a divided continent*, 2 - 20.
- Peers, S. (2015). The UK and The Schengen system. *KING College London Analysis*, 2.
- Prasetyo, Z. (2016, Juli 28). *Selasar Politik*. Dipetik agustus 22, 2016, dari Selasar Politik Web site: www.selasarpolitik.com/politik/brexit-mengingat-kembali-referendum-1975
- EUR-Lex*. (2015, Agustus 3). Dipetik March 16, 2017, dari EUR-LEX : <http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3A133020>
- Vote Leave Official Website*. (2016). Dipetik February 20, 2017, dari Vote Leave Official Website: http://www.voteleavetakecontrol.org/why_vote_leave.html
- Fullfact.org.(2015). *EU Immigration to the UK*. Dipetik April 1,2017, dari <https://fullfact.org/immigration/eu-migration-and-uk/>
- Gerty Firlmna.(2016, Januari 5).”*Why doesn't England use euro?*.”Dipetik Maret 15,2017, dari <http://www.investopedia.com/ask/answers/100314/why-doesnt-england-use-euro.asp>
- Official Result from Electoral Commission of EU Referendum in Manchester,”<http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/journalist/electoral-commission-media-centre/news-releases-referendums/official-result-of-the-eu-referendum-is-declared-by-electoral-commission-in-manchester>

Samuel. (2015, May 25). *BBC News*. Dipetik Februari 15, 2017, dari BBC News:
<http://www.bbc.com/news/politics/constituencies/E14000668>

UK Independence Party Official Site,"www.ukip.org (akses 15 Februari 2017)